

PERSEPSI MASYARAKAT BANYUMAS TENTANG DEMOKRASI

Chusmeru dan Edi Santoso

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSOED

e-mail: chusmeru@yahoo.com

Abstract

The process of democracy in Indonesia post reformation movement find the procedural form. It's indicated by the election agenda to be held at the most of region in Indonesia that's called pilkada. However, democratization haven't offer the people prosperous yet.

This research intends to know the Banyumas people perception related to the democratization process, especially in the political election. This research is designed particularly for people who have a right to vote in the 2009 election. The sample were collected is random sampling. The number of sample are 400 people.

The result shows that the majority of Banyumas people feel satisfied to the process of democracy in Indonesia, especially in the freedom of religion, freedom of speech, freedom of assemble and organization, and the gender equality.

However, the majority of Banyumas people are not enough satisfied to the job performance of the both legislative and executive apparatus.

Keywords: *democracy, election, job performance*

Pendahuluan

Demokrasi terlanjur dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik. Demokrasi, menurut Juan J. Linz (2001), telah menjadi "the only game in town" (satu-satunya aturan yang berlaku). Itulah kenapa sejak negeri ini lahir, rezim yang berkuasa selalu mengklaim pemerintahannya demokratis. Kalau umur negeri 63 tahun, maka selama itu pula lah kita berupaya menerapkan demokrasi.

Demokratisasi di Indonesia kian menemukan bentuknya pasca reformasi, setidaknya secara prosedural. Ukuran sederhananya, lihatlah betapa masyarakat kini selalu disibukkan oleh berbagai agenda pemilihan (*election*), mulai dari pilkades, pilkada (baik tingkat kabupaten/ kota maupun propinsi), hingga pileg dan pilpres nanti. Ini sungguh hiruk pikuk yang menguras energi bangsa ini. Bayangkan, jika Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan 489 kabupaten/kota (data per November 2008), dan dalam lima tahun ke depan semua daerah menyelenggarakan

pilkada secara tidak bersamaan, maka setiap empat hari sekali di Indonesia diselenggarakan pemungutan suara pemilu kepala daerah. Bisa jadi, pesta demokrasi di Indonesia menjadi paling ramai dan sering dibanding negara mana pun di dunia ini.

Demokrasi prosedural di negeri ini memang baru membawa hiruk pikuk, belum menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Reformasi pun diolok-olok menjadi 'Repotnasi', karena krisis ekonomi tak juga kunjung teratasi. Demokratisasi justru banyak menyuguhkan perilaku-perilaku korup para elite. Rakyat terlihat sibuk saat kampanye dan hari pemilihan (pesta demokrasi), tapi rakyat absen dari pesta para politisi dan pejabat di hari-hari kemudian. Seringkali terlalu sulit bagi rakyat untuk memahami manfaat demokrasi jika yang terjadi kemudian adalah mandulnya peran pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan. Maka, berbagai elemen demokrasi kini terancam krisis kepercayaan.

Lebih dari separuh abad kita belajar

demokrasi, tetapi nampaknya banyak di antara masyarakat yang mulai frustrasi. Karena demokrasi yang diharapkan membawa perubahan dengan muara kesejahteraan nampaknya tak kunjung datang. Lebih parah lagi, reformasi yang sering dianggap sebagai tonggak pesatnya demokratisasi di Indonesia justru diikuti krisis multi dimensi. Krisis ini awalnya mungkin karena gejolak global, tetapi sepuluh tahun kemudian sistem demokrasi ternyata tak cukup menjadi modal untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.

Pimpinan nasional silih berganti tetapi krisis tak beranjak pergi. Demokratisasi terus melesak, terdistribusi ke daerah dalam bentuk otonomi. Pemimpin-pemimpin baru terpilih secara demokratis, tetapi sekali lagi rakyat harus gigit jari. Kesejahteraan yang diimpikan nampaknya masih jauh panggang dari api. Demokratisasi justru banyak menghadirkan inefisiensi lembaga, inkompetensi dan perilaku korup para elite.

Kalau sekarang politik uang (*money politic*) kian marak bisa jadi karena orang semakin frustrasi terhadap demokrasi. Orang mulai berpikir, demokrasi tak memberikan apa-apa selain energi yang terkuras saat ritual seperti pemilu berlangsung. Daripada tak mendapatkan apapun, rakyat pun rela menukar integritasnya dengan selebar uang politik. Jika ini terjadi, maka demokratisasi akan semakin kehilangan esensinya.

Gejala frustrasi juga nampak dari kian tingginya angka golput (tidak memberikan suara) dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada). Ini, antara lain tercermin dalam rendahnya masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2008 di beberapa Provinsi, misalnya di Jabar 33%, Sumut 42%, Kaltim (Putaran I 39% dan Putaran II 43%), NTT 23%, Jateng 46%, NTB 27%, Bali 25%, Maluku 22%, Jatim (Putaran II 45,63%), Lampung 33%, Sumsel 27% atau rata-rata 33,2%.

Sebagai paham yang menempatkan rakyat di atas segalanya, demokrasi dibentuk oleh rakyat dengan karakteristiknya yang beragam.

Dengan kata lain, sukses tidaknya pelaksanaan demokrasi mensyaratkan kesiapan masyarakat. Di luar tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi, persepsi masyarakat terhadap demokrasi juga akan sangat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi.

Persepsi, dalam perspektif interaksionisme simbolik, menjadi relevan untuk diamati. Karena, persepsi adalah awal dari pemaknaan, dan pemaknaan akan menjadi kesadaran. Segala perilaku berangkat dari pemaknaan dan kesadaran tertentu. Penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap demokrasi menjadi semakin relevan ketika bangsa ini menghadapi salah satu ritual penting demokrasi, yakni pemilu 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Banyumas. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2009, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sampel sejumlah 400 orang diambil secara acak (random) dari populasi.

Penelitian ini menggunakan perspektif kuantitatif, dengan metode survey. Sampel masyarakat yang diambil sebanyak 400 orang, dengan asumsi tingkat kepercayaan sebesar 95% dan sampling error sebesar 5%. Angka ini diperoleh berdasarkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut (Eriyanto, 1999):

$$N = (p \times q) \frac{Z^2}{E^2}$$

(p x q) : Variasi proporsi populasi

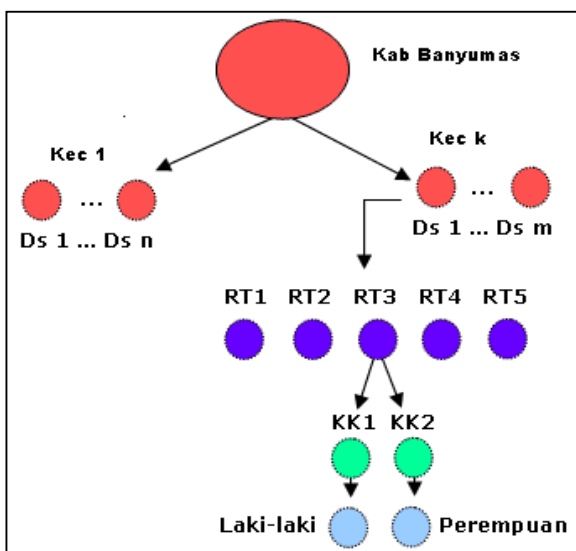
Z : Ukuran tingkat kepercayaan

E : *Sampling error*

Sampel dipilih dengan teknik *multistage random sampling*, yaitu dengan memilih sampel secara bertahap, mulai dari pemilihan kecamatan, kelurahan/ desa, hingga responden

Efektivitas Metode Bermain Peran dalam Membangun Berpikir Positif Siswa SMK

secara *random*. Berikut gambaran tahapan pengambilan sampel:



Data dianalisis dengan alat bantu statistik deskriptif, berdasarkan variable yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

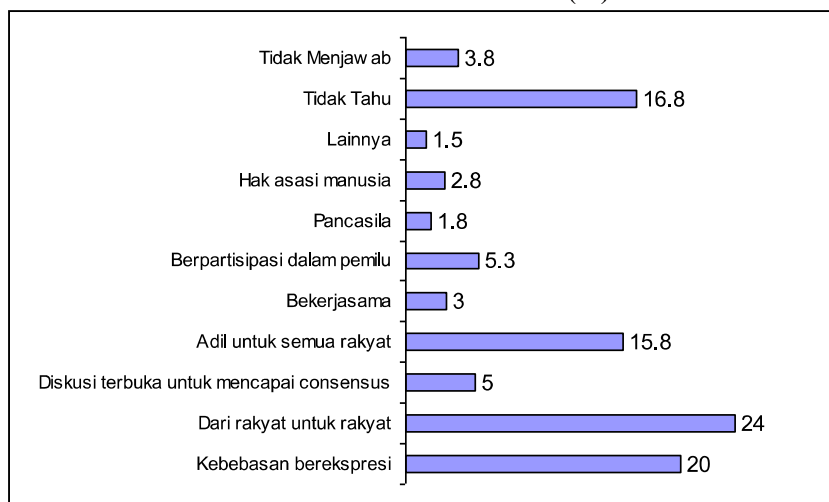
Memaknai demokrasi tak bisa sekadar menelaah secara teoritis atau konseptual. Karena, pada akhirnya demokrasi baru

menemukan relevansinya pada dunia praktis. Dan rakyat sebagai elemen pokok dalam demokrasi absah mendefinisikan, memaknai atau menilai praktik demokrasi. Pembahasan ini akan difokuskan mulai dari definisi umum tentang demokrasi, persepsi tentang beberapa elemen demokrasi, juga pandangan dan sikap masyarakat terhadap ritual demokrasi seperti pemilu dan juga terhadap praktik layanan umum sebagai produk proses demokrasi.

1. Definisi Demokrasi

Demokrasi dapat didefinisikan menurut apa yang dirasakan asyarakat. Responden diberi alternatif definisi, yang sebelumnya merupakan rangkuman jawaban atas pertanyaan terbuka. Mayoritas responden (24 persen) mendefinisikan demokrasi sebagai “dari rakyat untuk rakyat”. Di bawah itu, 20 persen responden mengartikan demokrasi sebagai ”kebebasan berekspresi”. Mereka yang mengartikan demokrasi sebagai pemungutan suara (berpartisipasi dalam pemilu hanya 5,3 persen. Banyak juga di antara responden yang mengaku tidak tahu definisi demokrasi 16,8 persen. Sementara itu, 3,8 persen responden tidak menjawab

Grafik 1. Definisi Demokrasi (%)



2. Persepsi Praktik Demokrasi

Praktik demokrasi bisa dilihat dari realisasi beberapa indikator, antara lain pada kebebasan berbicara, menjalankan ajaran agama, berserikat dan berkumpul, dan juga

pada kesetaraan gender.

2.1. Kebebasan Berbicara

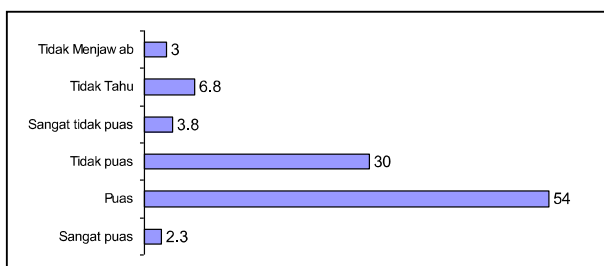
Praktik kebebasan berbicara merupakan salah satu indikator demokrasi. Pasca reformasi, nampaknya kebebasan berbicara bagi rakyat menemukan bentuknya. Mayoritas

Efektivitas Metode Bermain Peran dalam Membangun Berpikir Positif Siswa SMK

responden (54 persen) mengaku puas dengan iklim kebebasan berbicara di Indonesia.

Namun begitu, masih banyak juga responden yang mengaku tidak puas (30 persen). Artinya, di tengah euforia kebebasan saat ini, tak sepenuhnya masyarakat merasakan kebebasan, khususnya kebebasan dalam berbicara. Secara lengkap persepsi mereka dalam hal ini nampak dalam grafik.2 berikut:

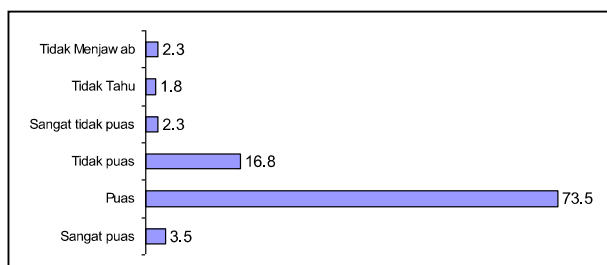
Grafik 2. Kepuasan atas Praktik Kebebasan Bicara (%)



2.2. Kebebasan Beragama

Elemen demokrasi berikutnya adalah kebebasan beragama. Masyarakat menilai kondisi praktik keagamaan di Indonesia lebih baik dibandingkan praktik berbicara. Itu yang tergambar dari suara mayoritas responden, yang mencapai 73,5 persen, yang mengaku puas dengan praktik kebebasan berbicara di Indonesia. Mereka yang tidak puas hanya 16,8 persen. Namun begitu, masih juga ada yang mengaku sangat tidak puas terhadap realitas kebebasan berbicara di negeri ini (2,3 persen).

Grafik 3. Kepuasan atas Praktik Kebebasan Bicara (%)

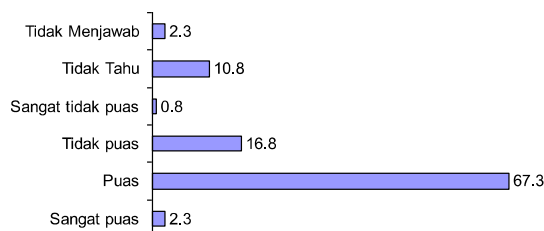


2.3 Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Masyarakat secara umum juga menilai bahwa kebebasan berkumpul dan berorganisasi

di Indonesia sudah berjalan relatif baik. Mayoritas responden (67,3 persen) mengaku puas dengan praktik kebebasan dan berorganisasi di negeri ini. Sementara itu, mereka yang mengaku tidak puas hanya 16,8%.

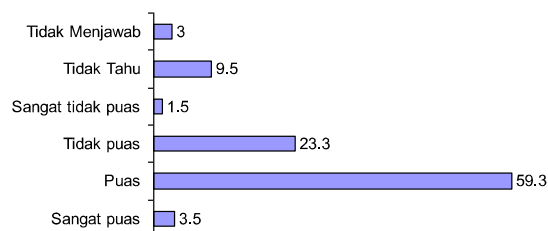
Grafik 4. Persepsi tentang Praktik Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (%)



2.4. Pemberian Hak Suara bagi Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada

Pasca reformasi, pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan penuh warna. Semangat jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (jurdil, luber), kian mendekati kenyataan. Selain itu, juga terdapat pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Mayoritas responden (59,3 persen) mengaku puas dengan pemberian hak suara dalam pemilu dan pilkada. Namun begitu, sebanyak 23,3 persen responden masih mengaku belum puas.

Grafik 5. Persepsi tentang Pemberian Suara bagi Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada (%)

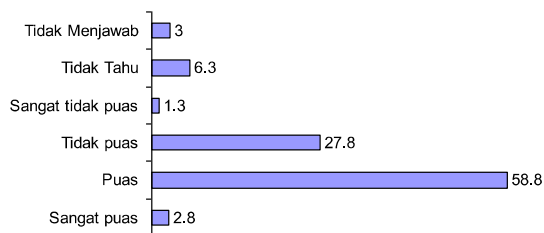


2.5. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia?

Demokrasi berarti juga pengakuan terhadap kesetaraan gender. Bagaimana

persepsi responden tentang hal ini? Mayoritas responden (58,8 persen) mengaku puas dengan praktik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun begitu, masih ada 27,8 persen yang mengaku tidak puas.

Grafik 6. Persepsi tentang Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan



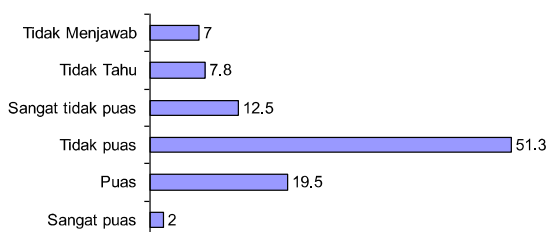
3. Persepsi Produk Demokrasi

Demokrasi dalam praktik akan nampak pada beberapa proses dan produknya, antara lain bagaimana pemilu berjalan dan juga bagaimana kinerja anggota dewan (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) yang dihasilkannya. Berikut ini adalah persepsi responden tentang kinerja wakil rakyat dan juga pemerintahan sebagai output demokrasi.

3.1 Kinerja wakil rakyat Pilihan

Demokrasi dalam tataran praktik menekankan sistem perwakilan, khususnya dalam wilayah yang luas. Dengan kata lain, wakil rakyat adalah produk demokrasi. Di sinilah persoalannya, ternyata apresiasi masyarakat terhadap beberapa indikator demokrasi di atas berbeda dengan persepsi mereka terhadap wakil rakyat. Mayoritas responden (51,3 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja wakil rakyat. Hanya 19,5 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja wakil rakyat.

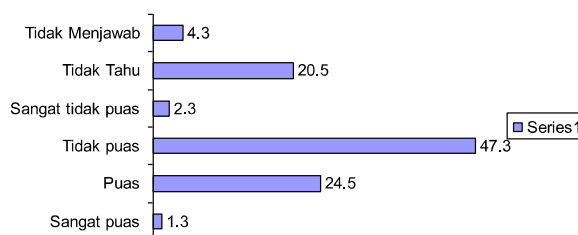
Grafik 7. Kepuasan terhadap Kinerja Wakil Rakyat Pilihan



3.2 Kinerja wakil rakyat Perempuan

Sebagaimana halnya dengan anggota Dewan secara umum, responden juga cenderung tidak puas dengan kinerja wakil rakyat dari kalangan perempuan, meskipun dengan prosentase yang lebih rendah. Sebanyak 47,3 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja wakil rakyat perempuan. Hanya 24,5 persen responden yang mengaku puas.

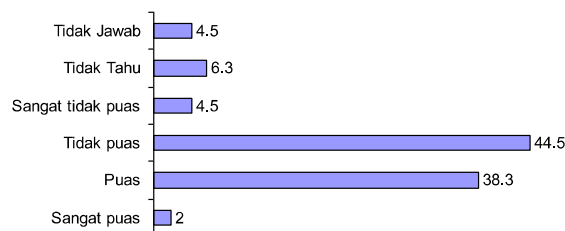
Grafik 8. Kepuasan terhadap Kinerja Wakil Rakyat Perempuan



3.3. Kinerja Pemerintah Pusat

Sejak 2004, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Inilah momentum demokrasi pertama dalam penentuan orang nomor satu di negeri ini. Sayangnya legitimasi rakyat tak selalu berbanding dengan kinerja. Faktanya, mayoritas responden (44,5 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat. Dan hanya 38,3 persen responden yang mengaku puas.

Grafik 9. Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah Pusat (%)

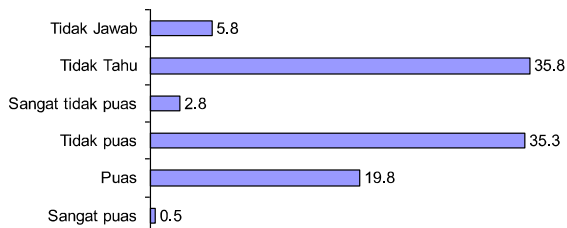


3.4. Kinerja Pemerintah Daerah

Persepsi responden terhadap pemerintah daerah juga relatif sama. Misalnya terhadap program gubernur Jateng "Bali Desa

Mbangun Deso”, mayoritas responden (32,3 persen) mengaku tidak puas, juga lebih banyak lagi (35,8 persen) mengaku tidak tahu.

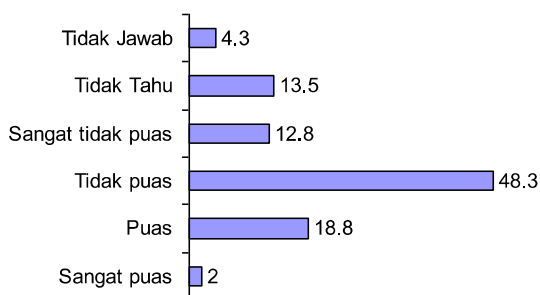
Grafik 10. Kepuasan terhadap kinerja gubernur Jateng dalam menjalankan program BALI DESO MBAGUN DESO (%)



3.5 Kinerja bupati Banyumas dalam mewujudkan program investasi

Bupati Banyumas Mardjoko dalam kampanye-nya menekankan program investasi, sebagai upaya membawa Banyumas menjadi lebih baik. Namun, mayoritas responden (48,3 persen) mengaku tidak puas terhadap realisasi kebijakan Bupati tersebut. Responden yang mengaku puas hanya 18,8 persen.

Grafik 11. Kepuasan terhadap kinerja bupati Banyumas dalam mewujudkan program investasi (%)



4. Partisipasi dalam Demokrasi.

Meskipun secara umum masyarakat tidak terlalu puas dengan praktik demokrasi, terutama pada produk-produk demokrasi (kinerja legislatif dan eksekutif), mereka tetap memberikan apresiasi yang tinggi pada ritual demokrasi. Ini Nampak dari komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Mayoritas responden (90,8 persen) menyatakan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu

2009. Hanya 1.8 persen responden yang akan golput.

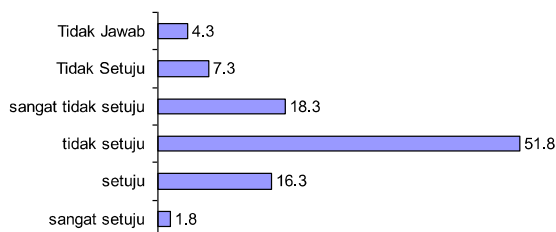
Gambar 12. Keikutsertaan pada pemilu 2009 (%)



5. Hambatan Demokrasi

Demokrasi, dalam praktiknya memang tak mudah dilaksanakan karena berbagai hambatan, antara lain karena budaya politik uang (*money politic*). Mayoritas responden (51,8 persen) menyatakan *money politic* sebagai masalah demokrasi, sehingga mereka menyatakan ketidaksetujuannya. 18,3 persen menyatakan sangat tidak setuju terhadap praktik *money politic*. Namun begitu, masih ada di antara responden yang setuju dengan *money politic* (16,3 persen).

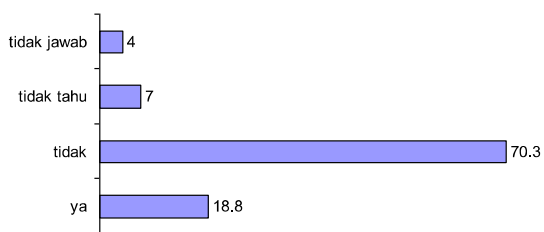
Grafik 13. Pendapat tentang money politic (%)



Mayoritas responden (70 persen) mengaku tidak akan terpengaruh dengan *money politic*. Namun masih ada 18,8 persen responden yang mengaku pilihannya dipengaruhi oleh *money politic*.

Efektivitas Metode Bermain Peran dalam Membangun Berpikir Positif Siswa SMK

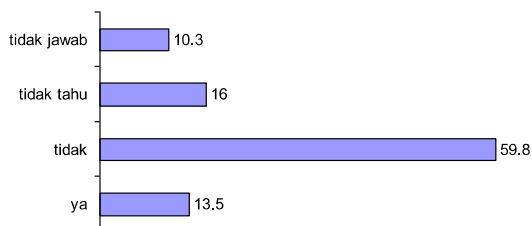
Gambar. 14. Apakah money politic mempengaruhi pilihan? (%)



6. Elektabilitas Perempuan

Mayoritas responden nampaknya tidak mempertimbangkan faktor gender dalam menentukan pilihan saat pemilu. Meskipun ada apresiasi kinerja atas anggota legislatif perempuan yang sedikit lebih positif dibandingkan anggota legislatif secara umum, namun mayoritas responden (59,8 persen) mengaku tidak akan cenderung memilih caleg perempuan. Hanya 13,5 persen responden yang cenderung memilih caleg perempuan.

Grafik.15. Kecenderungan memilih caleg perempuan (%)

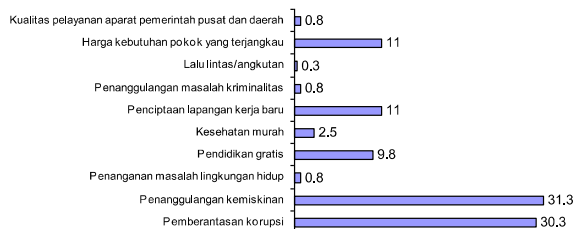


7. Agenda Demokrasi

Responden mencatat ada beberapa isu yang mestinya menjadi prioritas bagi legislatif

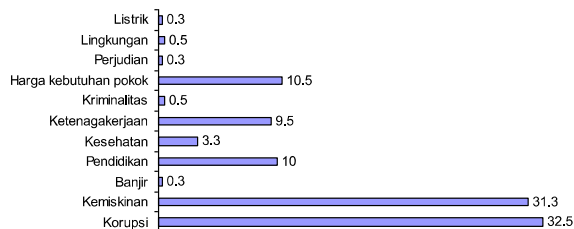
dan eksekutif untuk segera diselesaikan. Isu atau program utama yang diharapkan bisa dituntaskan oleh anggota Dewan adalah penanggulangan kemiskinan. Sebanyak 31,3 persen responden menyatakan hal itu.

Grafik 16. Isu/program prioritas bagi para wakil rakyat (%)



Meski pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik dan juga sedikit banyak tertangani oleh KPK, mayoritas responden (32,5 persen) tetap melihat hal ini sebagai prioritas utama bagi pemerintah untuk menuntaskannya.

Grafik 17. Isu/program Prioritas bagi Pemerintah (%)



Demokrasi, Perempuan, dan Partisipasi

Esensi demokrasi, kata Affan Gaffar (1999), adalah ‘kedaulatan ada di tangan rakyat’. Paham demokrasi meletakkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara kedaulatan, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kedaulatan. Karenanya, rakyat lah yang sejatinya memiliki otoritas untuk memaknai demokrasi. Terlebih, pada akhirnya realitas demokrasi adalah realitas simbolik, yakni apa yang ada dalam kepala rakyat. Dalam konteks inilah pembahasan tentang persepsi demokrasi didudukkan.

Masyarakat Banyumas lebih banyak yang mendefinisikan demokrasi dalam perspektif klasik, sebagaimana yang selama ini diajarkan di bangku sekolah bahwa demokrasi adalah pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Pendapat mayoritas kedua mengartikan demokrasi sebagai kebebasan berekspresi. Pandangan ini nampaknya paralel dengan kecenderungan masyarakat yang terlalu lama menikmati euphoria kebebasan. Barangkali ini semacam antitesis kondisi di era Orde Baru yang restriktif. Jika Orde Baru lebih menonjolkan wajah non-Demokratis, maka era reformasi tampil sebaliknya. Reformasi identik dengan demokratisasi yang memberikan jaminan kebebasan.

Pandangan tentang kebebasan sebagai esensi demokrasi akan nampak dalam penilaian masyarakat terhadap praktik demokrasi. Pada beberapa indikator demokrasi, khususnya tentang kebebasan, masyarakat mengapresiasi secara positif. Mayoritas masyarakat mengaku puas dengan praktik kebebasan berbicara, kebebasan menjalankan ajaran agama, dan juga kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Indikator demokrasi lainnya yang juga dinilai sudah berjalan dengan baik adalah kesetaraan gender.

Persepsi positif tentang kebebasan bisa dipahami, karena faktanya banyak proses demokrasi yang memberi ruang bagi keterlibatan langsung masyarakat. Melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) misalnya, rakyat dilibatkan secara langsung untuk menentukan pemimpinnya, begitu juga dalam

pemilihan presiden (pilpres). Model mobilisasi rakyat melalui penggiringan suara semakin tidak populer.

Persepsi masyarakat terhadap demokrasi secara umum memang relatif positif, tetapi tidak terhadap produk proses demokrasi. Terhadap kinerja anggota Dewan misalnya, mayoritas masyarakat Banyumas mengaku tidak puas. Faktanya, citra anggota Dewan memang terpuruk belakangan ini. Media banyak memberitakan kasus-kasus korupsi anggota Dewan, baik di daerah maupun di pusat. Sementara itu target legislasi juga banyak yang belum tercapai. Banyak RUU dan juga Raperda yang masih menggantung hingga kini.

Persepsi ini tertuju pada anggota Dewan baik laki-laki maupun perempuan. Karena, ketika ditanya secara khusus persepsi tentang anggota Dewan dari kalangan perempuan, mayoritas responden juga menilai negatif. Ini memang ironi. Rakyat langsung memilih wakilnya di parlemen, tetapi para wakil ini kemudian mengingkari amanah yang diembannya.

Persepsi yang sama juga ditujukan kepada eksekutif. Banyak program eksekutif yang menjadi tema kampanye sebelumnya belum terealisasi di lapangan. Setidaknya itu persepsi masyarakat terhadap program ‘Bali Desa mBangun Deso’ Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan program investasi Bupati Banyumas Mardjoko. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak kenal dengan program-program tersebut.

Meski mengaku tidak puas, tak berarti masyarakat di Banyumas patah arang dengan demokrasi. Faktanya, mayoritas responden (lebih dari 90 persen) mengaku tetap akan menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini yang agak sulit dimengerti. Ternyata kekecewaan tidak paralel dengan tingkat partisipasi. Belum ada mekanisme penghukuman terhadap anggota Dewan melalui proses pemilihan.

Masyarakat nampaknya masih menaruh harapan untuk para anggota legislatif dan eksekutif. Setidaknya mereka berharap, orang-orang yang terpilih nantinya bisa

menyelesaikan beberapa persoalan mendasar, terutama pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dan juga korupsi yang hingga kini belum juga tuntas.

Khusus tentang gender, ternyata masyarakat tidak menjadikannya sebagai pertimbangan khusus dalam proses pemilihan. Bahkan responden perempuan sekalipun—yang selama ini dinilai lebih emosional, mayoritas menyatakan tidak cenderung memilih caleg dari kalangan perempuan. Fakta ini sebetulnya positif dalam kaca mata demokrasi. Gender memang semestinya tidak menjadi variabel dalam penentuan pilihan. Orang dinilai dari kinerjanya, bukan dari jenis kelaminnya.

KESIMPULAN

1. Secara konseptual, demokrasi lebih dimaknai dalam pengertian klasik, yakni sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.
2. Masyarakat Banyumas menilai pelaksanaan demokrasi secara beragam.
3. Mayoritas masyarakat menilai positif

(cenderung puas) terhadap realisasi nilai demokrasi dalam hal kebebasan menjalankan ajaran agama, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan untuk memberikan suara dalam pilkada/pemilu, serta kesetaraan gender.

4. Mayoritas masyarakat Banyumas tidak cukup puas atas kinerja legislatif maupun eksekutif.
5. Mayoritas masyarakat Banyumas tidak mempertimbangkan faktor jenis kelamin dalam memilih calon legislatif, kepala daerah, ataupun presiden.
6. Mayoritas Masyarakat Banyumas memiliki partisipasi politik yang tinggi. Ini ditunjukkan oleh komitmen mereka untuk turut serta dalam pemilu 2009.
7. Mayoritas masyarakat Banyumas tidak sepakat dengan budaya politik uang (*money politic*).
8. Pemberantasan korupsi dan pemberantasan kemiskinan merupakan agenda utama, menurut masyarakat, yang harus segera diselesaikan oleh eksekutif maupun legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Riza Noer. 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Baron, Robert dan Down Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Budiardjo, Mirriam. 1999. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Eriyanto. 1999. *Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat*. Bandung: Rosdakarya.
- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mashad, Dhurorudin dan Heru Cahyono, Syahfuan Rozi, Tri Ratnawati. 2005. *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pilkada*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sorensen, George. 2000. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar